



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2026) pp: 13024-13031

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Dalam Meningkatkan Kreativitas Siswa

Indiati¹, Ratih NK²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi dan Bisnis, Universitas Waskita Dharma Malang
ini.indiati@gmail.com, ratihnkirana@gmail.com

Abstrak

Implementasi Kurikulum Merdeka di SDN Lowokwaru 2 Kota Malang bertujuan untuk meningkatkan kreativitas siswa melalui pendekatan pembelajaran yang berpusat pada minat, bakat, serta pengalaman belajar berbasis proyek. Kurikulum ini memberikan ruang kebebasan bagi guru dan siswa dalam mengembangkan proses pembelajaran yang lebih fleksibel, kontekstual, dan bermakna. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus kajian pada proses implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka serta dampaknya terhadap kreativitas siswa di tingkat sekolah dasar. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan kepala sekolah, guru, siswa, serta orang tua. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori kebijakan publik menurut Thomas R. Dye, teori administrasi publik dari Nicholas Henry, teori implementasi kebijakan oleh George C. Edwards III, serta teori kreativitas yang dikemukakan oleh Guilford, Torrance, dan Munandar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka didukung oleh peran aktif kepala sekolah dalam kepemimpinan akademik, kesiapan dan komitmen guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, dukungan orang tua terhadap aktivitas belajar siswa, serta fleksibilitas kurikulum yang memungkinkan inovasi pembelajaran. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan sejumlah hambatan, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, akses dan pemanfaatan teknologi yang belum optimal, serta pemahaman guru terhadap konsep Kurikulum Merdeka yang belum merata. Kesimpulannya, penerapan Kurikulum Merdeka di SDN Lowokwaru 2 Kota Malang mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kreativitas siswa, yang tercermin dari keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat, tingginya keterlibatan dalam proyek pembelajaran, serta kemampuan menghasilkan karya yang orisinal dan inovatif.

Kata Kunci: Implementasi, Kurikulum Merdeka, kreativitas siswa

1. Latar Belakang

Berikut Kurikulum Merdeka, sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024, merupakan kebijakan pendidikan nasional yang berfokus pada pembelajaran berpusat pada siswa, penguatan karakter, dan pengembangan kreativitas. Implementasinya di SDN Lowokwaru 2 bertujuan mencetak lulusan berkarakter Pancasila yang kreatif, mandiri, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Meski memberi peluang besar bagi peningkatan mutu pendidikan, tantangan seperti keterbatasan sarana prasarana dan pemahaman guru perlu diatasi agar implementasi berjalan optimal. Putri Jannati (2023), "Peran Guru Penggerak Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar Penelitian" Kebijakan terbaru yang dikeluarkan pemerintah melalui Kurikulum Merdeka hadir sebagai upaya memberikan ruang lebih luas bagi sekolah dan guru untuk menyelenggarakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kurikulum ini menekankan pentingnya pembelajaran berdiferensiasi, penguatan karakter, serta pelaksanaan proyek Profil Pelajar Pancasila. Dengan konsep tersebut, Kurikulum Merdeka diharapkan mampu mendorong peserta didik agar tidak hanya menguasai pengetahuan, tetapi juga memiliki keterampilan, kreativitas, serta karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini selaras dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Salah satu fokus utama dari Kurikulum Merdeka adalah pengembangan kreativitas siswa. Kreativitas dipandang sebagai kemampuan berpikir divergen yang memungkinkan individu menghasilkan gagasan, karya, atau solusi baru yang orisinal dan bermanfaat. Pada jenjang sekolah dasar, kreativitas sangat penting karena menjadi dasar pembentukan keterampilan abad 21, seperti berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan inovasi. Lingkungan belajar yang kondusif, pembelajaran berbasis proyek, serta dukungan guru dan orang tua menjadi faktor penting dalam menumbuhkan kreativitas tersebut. SDN Lowokwaru 2 Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

merupakan salah satu sekolah dasar yang telah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Penerapan ini bertujuan agar peserta didik lebih aktif, mandiri, dan inovatif dalam proses belajar. Melalui pembelajaran berdiferensiasi dan proyek Profil Pelajar Pancasila, siswa diberi kesempatan luas untuk mengekspresikan ide, bereksperimen, serta menghasilkan karya kreatif. Namun demikian, implementasi kurikulum ini tidak lepas dari berbagai kendala, seperti keterbatasan sarana teknologi, pemahaman guru yang belum merata, serta waktu pembelajaran yang terbatas untuk eksplorasi kreativitas siswa.

Rumusan masalah pertama dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah Implementasi Kurikulum Merdeka dalam meningkatkan kreativitas siswa SDN Lowokwaru 2 Kecamatan Lowokwaru Kota Malang?”. Fokus dari rumusan masalah ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kebijakan Kurikulum Merdeka diterapkan di sekolah dasar dan bagaimana penerapan tersebut berdampak pada perkembangan kreativitas siswa. Implementasi Kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa, melalui pendekatan diferensiasi, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, serta kegiatan berbasis pengalaman. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengungkap strategi guru, dukungan kepala sekolah, serta aktivitas pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk lebih aktif, berpikir kritis, dan berinovasi. Dengan demikian, rumusan masalah ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara penerapan Kurikulum Merdeka dengan peningkatan kreativitas siswa, baik dalam aspek ide, keterampilan, maupun sikap belajar di SDN Lowokwaru 2.

Secara etimologis, implementasi berarti menyediakan cara untuk melakukan sesuatu dengan efek. Implementasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang menggunakan berbagai sumber, termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasi, baik oleh pemerintah maupun swasta. Proses ini dilakukan untuk mencapai tujuan pembuat kebijakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "implementasi" berarti pelaksanaan atau penerapan. Nurdin Usman mengatakan implementasi adalah tentang aktivitas, aksi, tindakan, kegiatan, penerapan, atau mekanisme sistem yang ada untuk mencapai tujuan. Siregar dan Isnaini (2015) Namun, menurut Van Meter dan Horn, implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh individu dan kelompok, baik pemerintah maupun swasta, untuk mencapai suatu tujuan. (1) mereka mempersiapkan peraturan lanjutan yang menginterpretasikan kebijakan. (2) menyiapkan sumber daya untuk menggerakkan kegiatan implementasi, termasuk sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan. (3) Mereka mencari cara untuk menyebarkan kebijaksanaan secara konkret ke masyarakat.

Menurut perspektif ini, implementasi kebijakan sebenarnya mencakup banyak hal, bukan hanya perilaku administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan mendorong kelompok sasaran. Yuliah (2020) Proses ini juga mencakup jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang dapat memengaruhi perilaku semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung. Menurut Sulaiman, kebijakan publik didefinisikan sebagai suatu proses yang mencakup berbagai pola aktivitas tertentu, yang merupakan sekumpulan keputusan yang berkaitan dengan tindakan yang dapat diambil untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, konsep kebijakan publik terkait dengan tujuan pola aktivitas pemerintahan yang mencakup sejumlah masalah dan mengandung tujuan Sulaiman, (1998: 24). Kebijakan atau kebijaksanaan publik memiliki banyak arti ketika digunakan dalam kehidupan sehari-hari; namun, dapat digunakan untuk berbagai kegiatan atau keputusan.

Kebijakan Publik ini memiliki dua perspektif, menurut Amir Santoso. Pendapat pertama berasal dari mereka yang menganggap bahwa tindakan pemerintah sebanding dengan kebijakan publik. Pendapat kedua berasal dari para ahli yang sangat memperhatikan pelaksanaan kebijakan. Ekowati, (2009:5). Salah satu aspek Administrasi Publik adalah kebijakan publik yang berkaitan dengan keputusan tentang tindakan yang harus dilakukan. Dimensi kebijakan dianalogikan dengan pekerjaan otak manusia, yang selalu memutuskan apa yang harus dilakukan oleh sistem organ tubuh, atau dimensi struktur organisasi melalui energi, sistem penggerak dan kendali, atau dimensi manajemen Keban.

Administrasi adalah suatu fungsi yang memegang peranan yang sangat penting terhadap tercapainya kelancaran usaha kegiatan, maupun aktivitas yang dilakukan oleh sebuah perusahaan/organisasi tertentu. Administrasi memiliki dua lingkup pemaknaan, yakni administrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas. Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan ketatausahaan, sedangkan administrasi dalam arti luas mencakup semua kegiatan yang dilakukan melalui kerjasama dalam suatu organisasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan. Menurut Sondang P. Siagian Administrasi adalah “Keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan oleh rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Menurut Soetarto dan R.P Soewarno, Administrasi adalah “Suatu proses yang penyelenggaraan dan pengurusan segenap tindakan/kegiatan dalam setiap usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan”. Menurut The Liang Gie (1993), administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan

terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama yang mencapai tujuan tertentu. Hendrayady et al., (2022).

Menurut John M. Pfiffner (1960), Administration may be defined as the organization and direction of human and material resources to achieve desired ends. Administrasi dapat didefinisikan sebagai mengorganisasi dan menggerakkan sumber daya manusia dan materil untuk mencapai tujuan yang telah diinginkan. Darmanto, (2020). Menurut J.E. Walters (1959) Administration is the process of planning, organizing, managing, appraising and controlling an enterprise Administrasi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, penaksiran, dan pengawasan suatu perusahaan Darmanto, (2020) Dari beberapa pengertian administrasi dapat disimpulkan semua kegiatan yang mengandung unsur-unsur pokok yang sama yaitu kegiatan tertentu, adanya manusia yang melakukan kerjasama serta untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya adalah administrasi.

Kreativitas merupakan suatu bidang kajian yang kompleks, yang menimbulkan berbagai perbedaan pandangan. Definisi kreativitas sangat berkaitan dengan penekanan pendepenisian dan tergantung pada dasar teori yang menjadi dasar acuannya. Dalam kehidupan sehari-hari, kreatifitas adalah ungkapan yang tidak asing lagi, terutama bagi siswa yang selalu berusaha menciptakan sesuatu yang sesuai dengan ide-ide mereka. Kreativitas didefinisikan oleh Umami Munandar dalam M.Ali dan M.Arori sebagai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide dengan cara yang unik, luwes, dan kreatif. Pratiwi (2020) Torrace juga mengatakan bahwa kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan kesulitan atau tantangan dalam hidupnya, membuat hipotesis baru yang menyampaikan hasilnya, dapat mungkin mengubah dan menguji hipotesis yang dibuat. Belajar adalah proses perubahan tingkah laku yang terjadi selama interaksi antara seseorang dan lingkungannya. Proses ini terdiri dari rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bertahap, bergilir, seimbang, dan terpadu, yang secara keseluruhan membentuk dan memberikan ciri-ciri belajar-mengajar. Nana Sudjana mengatakan bahwa belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan perubahan pada diri seseorang, termasuk pengetahuan, pemahaman, sikap, dan tingkah laku, keterampilan, kecakapan, dan kemapuan, serta daya reaksi dan penerimaan Najwa (2018). Belajar merupakan suatu proses internal yang kompleks, dan terlibat di dalam proses internal yang meliputi unsur afektif, di dalam unsur afektif berkaitan dengan sikap, nilai-nilai, interest, apresiasi, dan penyesuaian perasaan sosial. Beberapa prinsip dasar belajar adalah sebagai berikut: (1) belajar berarti mencari makna; siswa membuat makna dari apa yang mereka lihat, dengar, rasakan, dan alami. (2) konstruksi makna adalah proses yang berkelanjutan. (3) belajar bukanlah kegiatan mengumpulkan fakta, tetapi merupakan pengembangan pemikiran dengan membuat pengertian yang baru. Belajar bukanlah hasil perkembangan, tetapi perkembangan itu sendiri. (4) hasil dipengaruhi oleh pengalaman subjek belajar dengan dunia dan lingkungannya. (5) hasil belajar siswa bergantung pada pengetahuan mereka dan motivasi mereka untuk berinteraksi dengan materi.

Administrasi dalam arti luas adalah tata usaha, administrasi yaitu proses yang melibatkan semua pihak untuk mencapai cita-cita bersama; dan tata usaha adalah proses kerja sama seluruh kekuatan untuk mencapai sekolah yang berkualitas tinggi. Administrasi pendidikan mencakup semua hal yang berkaitan dengan pendidikan, termasuk pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan optimal serta bagaimana menciptakan suasana yang baik bagi orang-orang yang berpartisipasi dalam pencapaian tujuan pendidikan yang disepakati bersama. Disini ditekankan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan kualitas kemandirian manusia adalah melalui pendidikan. Administrasi atau manajemen pendidikan, yang berarti mengelola, mengatur, atau menata pendidikan, sangat memengaruhi keberhasilan dan kegagalan pendidikan. Salah satu dari dua definisi administrasi pendidikan adalah sebagai berikut, dalam Ruang Lingkup Administrasi Pendidikan, Administrasi pendidikan juga termasuk dalam ruang lingkup administrasi. Dalam ruang lingkup tersebut terdapat dua bagian kegiatan. Yang pertama adalah manajemen administratif, juga dikenal sebagai manajemen fungsi administratif, yang berarti kegiatan yang bertujuan mengarahkan semua orang didalam organisasi atau kelompok untuk bekerja sama dengan mencapai tujuan yang tepat. Yang kedua adalah manajemen operasional, juga dikenal sebagai manajemen fungsi operasional, yang berarti kegiatan yang bertujuan mengarahkan agar semua orang dalam organisasi atau kelompok bekerja sama untuk mencapai tujuan yang tepat. Administrasi pendidikan, menurut buku kurikulum dan upaya perbaikan pendidikan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, adalah: suatu proses keseluruhan, kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahannya, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan. Tujuan administrasi pendidikan, Utu dan Sintasari (2021) Meskipun demikian, karena sekolah secara langsung menangani siswa, yang pada dasarnya merupakan subjek tujuan pendidikan, fokus administrasi pendidikan pada kegiatan sekolah seperti kepemimpinan kepala sekolah, supervisi guru, bimbingan siswa, dan lainnya. dan Tenaga Administrasi Sekolah Madrasah, Tenaga administrasi sekolah atau madrasah di jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah satu dari banyak subsistem dan komponen yang saling berkaitan dan yang membentuk proses pembelajaran di sekolah atau madrasah. Tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan akan sangat membantu

meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan. Selain itu, penyelenggara sekolah atau madrasah wajib memastikan bahwa tenaga administrasi di jenjang pendidikan dasar dan menengah memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi. Tenaga administrasi sekolah atau madrasah, juga dikenal sebagai tenaga tata usaha sekolah atau madrasah, sangat penting untuk proses pembelajaran karena mereka merupakan bagian dari proses pembelajaran dan tidak dapat melakukan tugas dan fungsi mereka sendiri.

Administrasi pendidikan di atur dalam beberapa pasal di undang-undang no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional sebagai berikut 1) Pasal 4 ayat (1) Prinsip Penyelenggaraan pendidikan Pasal ini meskipun tidak secara eksplisit mengatur administrasi, menjadi landasan penting karena menyebutkan salah satu prinsip penyelenggaraan pendidikan adalah efisien dan berkeadilan. Prinsip efisien ini tentu berimplikasi pada bagaimana administrasi pendidikan harus dikelola agar sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan efektif. 2) Pasal 48 Ayat (1) Tanggungjawab Pemerintah Daerah, Pasal ini secara umum mengatur tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan. Meskipun tidak merinci administrasi, pasal ini mengamanatkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan. Tanggung jawab ini mencakup aspek administratif, seperti perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan (undang-undang (UU) no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, 2003) dan evaluasi sistem pendidikan No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, 2003) dan evaluasi sistem pendidikan. 3) Pasal 49 ayat (1) pengelolaan satuan pendidikan oleh pemerintah daerah. Pasal ini menyatakan bahwa satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dikelola oleh badan hukum pendidikan. Ketentuan ini mengarah pada pemisahan antara fungsi regulasi dan fungsi operasional pendidikan. Badan hukum pendidikan memiliki otonomi dalam mengelola administrasi satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4) Pasal 50 ayat (1) dan (2) Pengelolaan Satuan Pendidikan oleh Masyarakat. Pasal ini mengatur pengelolaan satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat. Ayat (1) menyebutkan bahwa satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat dikelola oleh badan hukum pendidikan yang berbadan hukum nirlaba. Ayat (2) menyatakan bahwa badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa administrasi pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat juga harus mengikuti prinsip pengelolaan yang jelas dan akuntabel. 5) Pasal 51 ayat (1) Peran Serta Masyarakat, Pasal ini menegaskan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Peran serta ini juga dapat diwujudkan dalam bentuk dukungan administratif terhadap penyelenggaraan pendidikan. 6) Pasal 53 ayat (1) Pengawasan oleh Pemerintah dan Masyarakat Pasal ini mengatur tentang pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah dan masyarakat berhak melakukan pengawasan untuk menjamin mutu dan relevansi pendidikan. Pengawasan ini tentu melibatkan aspek administratif, seperti pemeriksaan laporan keuangan, pengelolaan sumber daya, dan kepatuhan terhadap peraturan. 7) Pasal 54 ayat (1) Akuntabilitas Lembaga Pendidikan. Pasal ini menyatakan bahwa penyelenggara pendidikan dan satuan pendidikan wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan dana pendidikan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas ini merupakan aspek penting dalam administrasi pendidikan, terutama terkait dengan pengelolaan keuangan dan sumber daya lainnya. 5) Kurikulum Merdeka, Kemdikbudristek (2020–2022), Kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran berdiferensiasi, proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila, serta fleksibilitas guru dalam menyusun perangkat ajar. Fokusnya adalah memberi ruang bagi siswa untuk mengembangkan potensi, minat, dan bakatnya secara optimal. 6) Profil Pelajar Pancasila, Kemdikbudristek (2021), Terdiri dari enam dimensi: beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Dimensi kreativitas selaras dengan tujuan penelitian karena menekankan kemampuan menghasilkan gagasan orisinal, bekerja inovatif, dan menghasilkan karya nyata.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus kajian pada proses implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka serta dampaknya terhadap pengembangan kreativitas siswa sekolah dasar. Pendekatan kualitatif dipilih karena dinilai paling tepat untuk memperoleh pemahaman yang mendalam, holistik, dan komprehensif mengenai bagaimana Kurikulum Merdeka diterapkan dalam konteks nyata di lingkungan sekolah. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengkaji secara detail berbagai tahapan implementasi kebijakan, mulai dari proses perencanaan pembelajaran, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas, hingga bentuk evaluasi yang dilakukan oleh pendidik terhadap hasil belajar siswa. Selain itu, metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam pengalaman, persepsi, serta pandangan para pelaku pendidikan, khususnya guru, kepala sekolah, dan siswa, terkait perubahan pola pembelajaran yang cenderung lebih fleksibel, adaptif, dan berpusat pada peserta didik sebagai dampak dari penerapan Kurikulum Merdeka.

Melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi, penelitian ini berupaya mengidentifikasi berbagai bentuk praktik pembelajaran kreatif yang muncul sebagai hasil

dari penerapan Kurikulum Merdeka di sekolah dasar. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses pembelajaran di kelas, interaksi antara guru dan siswa, serta keterlibatan siswa dalam berbagai aktivitas pembelajaran. Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh informasi yang lebih luas dan mendalam mengenai pandangan, pengalaman, serta strategi yang diterapkan oleh guru dan kepala sekolah dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, serta respons siswa terhadap model pembelajaran yang diterapkan. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah perangkat pembelajaran, modul ajar, serta hasil karya siswa sebagai bukti pendukung pelaksanaan kurikulum. Dampak kebijakan Kurikulum Merdeka terhadap kreativitas siswa dianalisis dengan melihat kemampuan siswa dalam mengekspresikan ide, berpikir kritis, berinovasi, serta berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris yang jelas dan komprehensif mengenai efektivitas implementasi Kurikulum Merdeka dalam mendorong terciptanya iklim pembelajaran yang lebih kreatif, bermakna, dan relevan dengan kebutuhan perkembangan siswa sekolah dasar.

3. Hasil dan Diskusi

Implementasi Kurikulum Merdeka di SDN Lowokwaru 2 Kota Malang menunjukkan adanya proses adaptasi yang relatif komprehensif dan berkelanjutan dalam praktik pembelajaran di kelas. Adaptasi tersebut tidak berlangsung secara instan, melainkan melalui tahapan penyesuaian yang melibatkan berbagai unsur sekolah, terutama guru dan manajemen sekolah. Kurikulum Merdeka dipahami sebagai kebijakan pendidikan yang memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk mengembangkan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik dan konteks sekolah. Dalam pelaksanaannya, SDN Lowokwaru 2 berupaya menyesuaikan kurikulum ini dengan kondisi riil siswa, baik dari segi kemampuan akademik, latar belakang sosial, maupun minat dan bakat yang beragam. Hal ini tercermin dari perubahan pola pembelajaran yang lebih fleksibel, adaptif, dan berorientasi pada pengembangan potensi siswa secara menyeluruh.

Guru telah berupaya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan mempertimbangkan perbedaan kemampuan, minat, dan gaya belajar siswa. Pembelajaran berdiferensiasi ini menjadi salah satu strategi utama dalam implementasi Kurikulum Merdeka, karena memungkinkan setiap peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhannya. Dalam praktik pembelajaran, guru tidak lagi menyamaratakan target dan metode pembelajaran, melainkan memberikan penyesuaian berdasarkan tingkat kesiapan belajar siswa. Penyesuaian tersebut dilakukan melalui variasi konten, proses, dan produk pembelajaran. Guru menyusun tugas dengan tingkat kompleksitas yang berbeda, menyediakan pilihan aktivitas belajar, serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan hasil belajar melalui berbagai bentuk karya. Dengan demikian, siswa memiliki ruang untuk belajar sesuai dengan potensi dan kecepatan masing-masing, tanpa merasa tertekan oleh tuntutan yang seragam.

Dalam praktiknya, guru memberikan variasi tugas dan aktivitas belajar, baik secara individu maupun kelompok, yang dirancang untuk mendorong keterlibatan aktif siswa. Aktivitas individu memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi kemampuan personal dan mengembangkan kemandirian belajar, sementara aktivitas kelompok melatih keterampilan sosial, kerja sama, dan komunikasi. Melalui pembelajaran kelompok, siswa belajar untuk saling menghargai pendapat, berbagi peran, serta menyelesaikan tugas secara kolaboratif. Pola pembelajaran seperti ini sejalan dengan tujuan Kurikulum Merdeka yang menekankan pada penguatan kompetensi dan karakter siswa secara seimbang. Selain itu, guru juga memanfaatkan konteks lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, sehingga materi pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan mudah dipahami oleh siswa.

Kegiatan Project Based Learning melalui Proyek Profil Pelajar Pancasila telah diintegrasikan ke dalam pembelajaran sebagai salah satu strategi utama untuk mengembangkan kreativitas siswa. Proyek Profil Pelajar Pancasila tidak hanya dipandang sebagai kegiatan tambahan, tetapi menjadi bagian integral dari proses pembelajaran yang dirancang secara sistematis. Melalui kegiatan proyek, siswa dihadapkan pada permasalahan nyata yang menuntut pemikiran kritis, kemampuan berkolaborasi, serta kreativitas dalam mencari solusi. Proyek-proyek yang dilaksanakan mendorong siswa untuk mengamati lingkungan sekitar, mengidentifikasi masalah, merancang ide, serta menghasilkan produk atau karya yang memiliki nilai guna. Dengan demikian, siswa tidak hanya belajar memahami materi secara teoritis, tetapi juga mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui proyek pembelajaran tersebut, siswa dituntut untuk menuangkan ide secara bebas dan kreatif, memecahkan masalah secara mandiri maupun kelompok, serta menghasilkan karya nyata yang mencerminkan pemahaman dan kreativitas mereka. Proses ini memberikan pengalaman belajar yang bermakna karena siswa terlibat langsung dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi hasil proyek. Pemberian ruang kebebasan berekspresi melalui tugas kreatif, kegiatan seni, serta eksperimen sederhana turut mendorong siswa untuk berpikir imajinatif dan inovatif. Siswa menjadi lebih berani mencoba hal-hal baru, tidak takut

melakukan kesalahan, dan memiliki kepercayaan diri dalam mengekspresikan gagasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka mampu menciptakan iklim pembelajaran yang mendukung pengembangan kreativitas dan potensi siswa secara optimal.

Peran guru dalam implementasi Kurikulum Merdeka mengalami pergeseran yang cukup signifikan dibandingkan dengan pendekatan pembelajaran sebelumnya. Guru tidak lagi berfokus pada penyampaian materi secara satu arah, melainkan berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang mendampingi siswa dalam proses belajar. Guru bertugas menciptakan situasi belajar yang kondusif, memberikan arahan yang tepat, serta menyediakan stimulus yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Dalam proses pembelajaran, guru mendorong siswa untuk aktif bertanya, berdiskusi, dan menyampaikan pendapat, sehingga tercipta suasana kelas yang interaktif dan partisipatif. Interaksi yang terbangun di dalam kelas tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi, tetapi juga mengembangkan keterampilan komunikasi dan keberanian dalam menyampaikan ide.

Guru juga memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap hasil karya siswa sebagai bentuk apresiasi dan motivasi. Umpan balik tersebut tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses yang dilalui siswa dalam menyelesaikan tugas atau proyek. Dengan demikian, siswa merasa dihargai dan terdorong untuk terus mengembangkan kemampuan mereka. Selain itu, guru juga melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, sehingga dapat melakukan perbaikan dan penyesuaian pada pembelajaran berikutnya. Praktik reflektif ini menunjukkan adanya komitmen guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran sesuai dengan prinsip Kurikulum Merdeka.

Kepala sekolah memegang peranan strategis dalam mendukung keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka di SDN Lowokwaru 2. Kepemimpinan kepala sekolah yang visioner dan responsif terhadap perubahan kebijakan pendidikan menjadi faktor penting dalam mendorong keberhasilan implementasi. Kepala sekolah secara aktif memberikan dukungan kepada guru melalui penyelenggaraan pelatihan, supervisi akademik yang berkelanjutan, serta penyediaan fasilitas pembelajaran yang memadai. Dukungan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kompetensi profesional guru sekaligus memastikan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, kepala sekolah juga berperan dalam membangun budaya sekolah yang terbuka terhadap inovasi dan perubahan.

Keberhasilan penerapan Kurikulum Merdeka di SDN Lowokwaru 2 juga didukung oleh berbagai faktor pendukung yang saling berkaitan. Dukungan orang tua menjadi salah satu aspek penting dalam menunjang pengembangan kreativitas siswa, terutama melalui keterlibatan mereka dalam mendampingi anak saat mengerjakan proyek atau tugas kreatif di rumah. Orang tua yang memberikan motivasi, perhatian, dan apresiasi terhadap hasil karya anak turut memperkuat rasa percaya diri dan semangat belajar siswa. Sinergi antara sekolah dan orang tua menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, baik di sekolah maupun di rumah. Selain dukungan orang tua, ketersediaan fasilitas sekolah yang relatif memadai juga membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran yang variatif dan menarik. Ruang kelas yang nyaman, media pembelajaran yang tersedia, serta lingkungan sekolah yang mendukung kegiatan belajar memberikan kontribusi positif terhadap proses pembelajaran. Komitmen guru dalam menerapkan Kurikulum Merdeka juga menjadi faktor penentu keberhasilan, yang terlihat dari kesediaan guru untuk terus belajar, mengikuti pelatihan, berdiskusi, dan berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam merancang pembelajaran yang inovatif dan berpusat pada siswa.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan beberapa faktor penghambat yang masih perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Keterbatasan sarana teknologi di beberapa kelas menjadi kendala dalam mengoptimalkan pembelajaran berbasis digital serta pelaksanaan proyek tertentu yang membutuhkan dukungan teknologi. Selain itu, perbedaan tingkat pemahaman guru terhadap konsep dan implementasi Kurikulum Merdeka menyebabkan adanya variasi dalam kualitas pelaksanaan pembelajaran di kelas. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendampingan dan pelatihan lanjutan secara berkelanjutan, serta forum berbagi praktik baik antar guru agar pemahaman dan keterampilan dapat lebih merata. Faktor keterbatasan waktu pembelajaran juga menjadi tantangan, karena alokasi waktu yang tersedia terkadang belum sepenuhnya mendukung eksplorasi kreativitas siswa secara maksimal, terutama pada kegiatan proyek yang memerlukan proses yang panjang dan mendalam.

Berdasarkan temuan utama penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di SDN Lowokwaru 2 memberikan dampak positif terhadap peningkatan kreativitas siswa sekolah dasar. Peningkatan kreativitas tersebut terlihat dari keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat, kemampuan berpikir kritis, serta keterampilan menghasilkan karya kreatif yang beragam. Siswa juga menunjukkan keterlibatan yang lebih aktif dalam proses pembelajaran, khususnya dalam kegiatan proyek dan diskusi kelompok. Meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka memiliki potensi besar dalam menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna, kontekstual, dan

berorientasi pada pengembangan potensi siswa secara holistik apabila didukung oleh komitmen seluruh warga sekolah serta pemangku kepentingan terkait.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di SDN Lowokwaru 2 Kecamatan Lowokwaru Kota Malang telah berjalan dengan baik dan menunjukkan hasil yang positif dalam praktik pembelajaran di sekolah dasar. Penerapan kurikulum ini berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan kreativitas siswa melalui perubahan pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel, adaptif, dan berpusat pada peserta didik. Guru telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi serta proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila yang memberikan ruang luas bagi siswa untuk bereksplorasi, mengembangkan ide, berpikir kritis, dan menghasilkan karya-karya yang inovatif. Kreativitas siswa terlihat dari meningkatnya keberanian dalam mengemukakan pendapat, keterlibatan aktif dalam kegiatan pembelajaran berbasis proyek, serta kemampuan siswa dalam menghasilkan karya yang bersifat orisinal dan mencerminkan pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran.

Keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka tersebut didukung oleh berbagai faktor pendukung yang saling berkaitan. Komitmen guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang inovatif menjadi faktor utama dalam mendorong kreativitas siswa. Selain itu, dukungan kepala sekolah melalui kepemimpinan yang visioner, supervisi akademik, serta fasilitasi pengembangan kompetensi guru turut memperkuat pelaksanaan kurikulum. Dukungan orang tua juga berperan penting, khususnya dalam mendampingi siswa saat mengerjakan tugas dan proyek pembelajaran di rumah, sehingga proses belajar siswa dapat berlangsung secara berkesinambungan. Ketersediaan fasilitas sekolah yang relatif memadai turut membantu terciptanya lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung pelaksanaan pembelajaran yang variatif.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan beberapa faktor penghambat dalam implementasi Kurikulum Merdeka, antara lain keterbatasan sarana teknologi yang belum merata di setiap kelas, perbedaan tingkat pemahaman guru terkait konsep dan penerapan Kurikulum Merdeka, serta keterbatasan alokasi waktu pembelajaran. Meskipun demikian, secara keseluruhan penerapan Kurikulum Merdeka di SDN Lowokwaru 2 mampu memberikan dampak positif terhadap pengembangan kreativitas siswa dan dinilai relevan untuk terus ditingkatkan dan dikembangkan dalam konteks pendidikan dasar guna mendukung pembelajaran yang lebih bermakna dan berorientasi pada pengembangan potensi siswa secara optimal.

Saran

Bagi pihak sekolah, perlu dilakukan upaya peningkatan dukungan terhadap fasilitas pembelajaran, khususnya yang berkaitan dengan penyediaan sarana teknologi dan media pembelajaran kreatif. Ketersediaan fasilitas yang memadai diharapkan dapat menunjang pelaksanaan pembelajaran yang lebih inovatif serta mendukung optimalisasi implementasi Kurikulum Merdeka di lingkungan sekolah. Selain itu, sekolah juga perlu terus menciptakan iklim belajar yang kondusif dan mendorong pemanfaatan fasilitas secara maksimal oleh seluruh warga sekolah.

Bagi guru, diharapkan untuk terus mengembangkan kompetensi profesional dan pedagogik melalui berbagai kegiatan pelatihan, workshop, serta kolaborasi dengan sesama pendidik. Pengembangan kompetensi ini penting agar guru memiliki pemahaman yang selaras dan komprehensif dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi serta pelaksanaan proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila. Dengan pemahaman yang merata, kualitas implementasi Kurikulum Merdeka di setiap kelas dapat lebih konsisten dan efektif dalam mendorong kreativitas siswa.

Bagi siswa, diharapkan dapat lebih aktif dan berperan serta dalam setiap proses pembelajaran yang berlangsung. Siswa didorong untuk berani bereksperimen, mengemukakan ide, serta memanfaatkan berbagai kesempatan belajar yang diberikan oleh guru, khususnya dalam kegiatan berbasis proyek dan tugas kreatif. Keaktifan dan keberanian siswa dalam bereksplorasi diharapkan dapat menjadi sarana utama dalam menumbuhkan dan mengembangkan kreativitas secara berkelanjutan.

Bagi orang tua, dukungan terhadap proses belajar anak perlu terus ditingkatkan melalui pendampingan, motivasi, serta pemberian apresiasi terhadap hasil belajar dan karya siswa di rumah. Keterlibatan orang tua secara aktif diharapkan dapat memperkuat sinergi antara lingkungan sekolah dan keluarga, sehingga pengembangan

keaktivitas siswa dapat berlangsung secara optimal dan berkesinambungan.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas objek dan cakupan penelitian dengan melibatkan sekolah lain atau jenjang pendidikan yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan beragam mengenai implementasi Kurikulum Merdeka serta pengaruhnya terhadap pengembangan kreativitas siswa, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan kebijakan dan praktik pendidikan di Indonesia.

Referensi

- Agustini, Pratiwi. 2020. "Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2019." Diambil 21 Juni 2023 (<https://aptika.kominfo.go.id/2020/02/kompetisi-inovasi-pelayanan-publik-2019/>).
- Ali, M. (2017). Kebijakan pendidikan menengah dalam perspektif governance di Indonesia. Universitas Brawijaya Press.
- Darmanto, 2020. (Terkait Psikologi Sastra, Karya Sastra, Metode, Teori, dan Contoh Kasus).
- Ekowati, D. W., & Suwandayani, B. I. (2018). Literasi numerasi untuk sekolah dasar (Vol. 1). UMM Press.
- Fridiyanto, F., Purwaningrum, S., Abdullah, A. R., Rosi, F., Haryanto, T., Farih, A., ... & Setyawan, C. E. (2022). Merdeka Belajar Dan Kampus Merdeka.
- Fitriyani, I., & Setyaningsih, F. A. (2024). Memahami Kurikulum Merdeka Di Lingkungan Sekolah Dasar. *Global Education Trends*, 2 (2).
- Hendrayady, A. (2022). Pelayanan Publik Di Era Tatanan Normal Baru. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Jannati, Putri, Faisal Arief Ramadhan, and Muhammad Agung Rohimawan. 2023. Peran Guru Penggerak Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka. *All Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*.
- Meldika Putri, R. I. Z. Q. I. A., Ratnawati, R., & Amrillah, H. M. (2024). Problematika Guru Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Sdn 77 Rejang Lebong (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Curup).
- Muhammad, K. A. (2025). Pengembangan Modul Ajar P5 Untuk Implementasi Kurikulum Merdeka Di Tk Al-Hakim Kids Kalianda (Doctoral Dissertation, Pascasarjana Teknologi Pendidikan).
- Muhammad, A. S., Suswaini, E., Atmajha, M. C., Perdana, P., & Giawa, A. (2022). Digitalisasi Layanan, Upaya Meningkatkan Investasi Daerah.
- Pfiffner, John M., & Presthus, Robert V. (1960). *Public Administration*. New York: The Ronald Press Company.
- Sembiring, B. K. P. (2016). Perilaku Aparat Birokrasi Dalam Pelayanan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Sulaiman, A. (1998). *Public Policy-Kebijakan Pemerintah yang diterbitkan di Bandung oleh Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) kerjasama UNPAD*
- Walter, J. E. 1963. "Dividend policy: its influence on the value of the enterprise". *Journal of Finance*, Vol. 18, Issue 2, pp. 280-291.